

Bupati Batalkan Kenaikan Tarif Air

Sri Juniarsih Bantah Pernah Tanda Tangan

TANJUNG REDEB, TRIBUN - Hari pertama ngantor di tahun 2025, Bupati Berau Sri Juniarsih langsung batalkan kenaikan tarif air Perumda Batiwakkal. Ia pun mengakui, tak pernah memberikan tanda tangan untuk penyesuaian tarif air Perumda Batiwakkal.

"Saya memang baru hadir, selepas cuti berobat yang tiap tahun saya laksanakan. Kita sudah mendengar isu yang menjadi kegelisahan semua masyarakat," jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (6/1).

Sri Juniarsih Mas bantah pernah tanda tangani Surat Keputusan Penyesuaian Tarif Perumda Air Batiwakkal. Yang ia maksud yakni Surat Keputusan Bupati (Kepbup) Nomor: 705/2024 tentang Penetapan Tarif Air pada Perumda Batiwakkal 2024/2025.

"Takut saya lupa, saya sudah menanyakan kepada Dewan Pengawas, ajudan saya, pihak Perumda Batiwakkal, dan Bagian Hukum. Bahwa saya tidak ada menandatangani surat itu," ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (6/1).

Dan dalam surat itu dijelaskan olehnya bahwa surat tersebut keluar pada tanggal 29 September. Bertepatan pada ia sedang cuti Pilkada.

Saat ia cuti, kursi kepala daerah resmi diduduki oleh Pjs Bupati Berau Sufian Agus.

Pjs tidak bisa menandatangani kebijakan strategis yang berdampak luas bagi warga Bumi Batiwakkal dan ditegaskan Bupati Sri Juniarsih, Pjs tidak menandatangani. "Tidak mungkin kan saat saya cuti, saya menandatangani," tegasnya.

Ia juga tidak tahu menahu siapa yang membuat surat tersebut. Ia mengatakan, bisa jadi bahwa pembuat surat tersebut bodoh ataupun berhianat. "Itu bisa jadi surat palsu. Kalau saya lihat suratnya, itu menggunakan titel, biasanya surat tidak menggunakan titel seperti itu," jelasnya.

"Saya sudah perintahkan untuk memproses surat tersebut, untuk diselidiki. Jangan jadi surat ini sebagai alat memprovokasi pemerintahan," lanjutnya

Lantaran adanya kegelisahan masyarakat itulah, Ia sebagai Kuasa Pemegang Modal (KPM) memutuskan untuk menunda terlebih dahulu. Namun, ditegaskannya tarif air Perumda Batiwakkal pun akan tetap naik. Setelah pertinjauan-pertinjauan lainnya yang akan segera mereka rapatkan kembali.

Adanya pertimbangan kenaikan tarif itupun menindaklanjuti surat dari Prov Kaltim. Apalagi, Berau sejak tahun 2011 tidak pernah menaikkan tarif air, dan menjadi yang terendah di kabupaten dan kota Kaltim.

Ia juga membeberkan, jika Berau tak menaikkan tarif air, maka Perumda Batiwakkal akan digabung dengan PDAM Kutim. Sri tak menginginkan adanya penggabungan PDAM Kutim dan Berau. "Jika digabungkan, maka akan tambah sulit jika mau mengurus sesuatu," tegasnya.

Masyarakat diminta untuk bersiap terkait adanya kenaikan tarif nantinya. Untuk lebih bijak menggunakan air bersih. Sementara menunggu kebijakan selanjutnya, pihaknya meminta seluruh elemen terkait agar melakukan sosialisasi penyesuaian tarif. "Jika tarif pun akan naik, Perumda harusnya bisa memberikan kualitas yang terbaik," tutupnya. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribunkaltim.co, Bupati Batalkan Kenaikan Tarif Air, Sri Juniarsi Bantah Pernah Tanda Tangan, 07/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum, pelanggan wajib:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan air minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan.